



LUAPAN LIMBAH MINYAK DI KAWASAN TUGU

Temukan Indikasi Pelanggaran, Pengusaha Dipanggil

YOGYA (KR) - Hasil investigasi atas kejadian luapan limbah minyak di kawasan Tugu mulai ada titik terang. Pemkot Yogya sudah menemukan indikasi pelanggaran dan kini tengah melakukan pemanggilan terhadap pengusaha di kawasan itu.

Penjabat (Pj) Walikota Yogya Singgih Raharjo, mengaku dugaan pelanggaran itu berupa indikasi malprosedur dalam pengelolaan limbah. "Sebelum dialirkan ke saluran limbah, seharusnya diolah dulu. Ada beberapa usaha yang diduga tidak melakukan filtrasi," ungkapnya, Rabu (8/11).

Pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran itu saat ini tengah diklarifikasi oleh Sat Pol PP. Terdapat sekitar tiga pelaku usaha yang dipanggil oleh penyidik pe-

gawai negeri sipil. Kendati sudah mengarah pada indikasi pelanggaran namun Singgih mengaku tidak akan gegabah dalam mengambil keputusan.

Diakukannya proses investigasi terhadap luapan limbah di Tugu memakan waktu cukup lama. Lebih dari sepekan sejak pertama kali dilaporkan meluap pada 31 Oktober 2023 lalu, hingga saat ini juga belum ada kesimpulan akhir. Bahkan pada Senin (6/11) justru diketahui kembali meluap meski intensitasnya ti-

dak sebanyak kejadian sebelumnya.

"Memang butuh waktu untuk melihat limbah dari mana saja yang masuk. Tetapi yang jelas, pendalaman tidak hanya di kawasan Jalan AM Sangaji saja tetapi juga beberapa unit usaha yang ada di Jalan Pangeran Diponegoro. Sekarang (kemarin) ini sedang dipanggil oleh Sat Pol PP," imbuhnya.

Hasil dari klarifikasi itu nantinya akan dikroscek dengan kondisi di lapangan. Terutama menyangkut saluran air limbah yang tersambung dengan unit usaha tersebut. Jika terbukti tidak sesuai prosedur, maka ada ancaman sanksi yang menanti yakni pidana maksimal tiga bulan kurungan atau denda paling banyak Rp 50 juta. Sesuai prosedur limbah

jenis sisa makanan harus diolah dahulu melalui grease trap untuk menyaring lemak, baru kemudian diperbolehkan disalurkan ke saluran limbah.

Kendati demikian, Singgih mengaku kejadian tersebut juga menjadi evaluasi bagi jajarannya. Pasalnya proses perizinan saat ini cukup mudah melalui sistem online. Bisa jadi sesuai syarat sudah dipenuhi namun dalam aplikasinya tidak menjalankan prosedur.

"Evaluasi dalam proses pengawasan akan kami kedepankan. Tidak boleh lagi terjadi. Dan jelas, bagi yang melanggar pasti kami tindak," tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Sat Pol PP Kota Yogya Octo Noor Arafat, meng-

aku proses investigasi melibatkan beberapa instansi seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman serta kewilayahan. Hasil dari penelusuran, justru usaha di sekitar Tugu tidak tersambung ke dalam saluran limbah yang meluap tersebut. Sehingga proses investigasi juga tidak bisa dilakukan dalam tempo cepat. Akan tetapi dimungkinkan ada tiga unit usaha yang memasukan limbah ke saluran tersebut namun tanpa ada proses pengolahan.

"Tetapi ini kita kedepankan praduga tak bersalah. Perlu kami klarifikasi dulu atas temuan yang diperoleh oleh dinas lain yang melakukan penelusuran," katanya. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP 2. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005